

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DENGAN FOKUS PADA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TANA TORO

Sukman<sup>1</sup>, Irwan<sup>2</sup>, Muhammad Rais Rahmat Razak<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: sukmansukman3112@gmail.com

Email: irwanirwan41083@gmail.com; mraisrahmat@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of the Tana Toro Village Government in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), with a particular focus on poverty alleviation efforts. Poverty is understood as a multidimensional issue, encompassing not only economic deprivation but also limited access to education, health services, infrastructure, and community empowerment. At the village level, responsive and inclusive policies are essential to ensure effective SDGs implementation. This research employs a descriptive qualitative approach through a case study in Tana Toro Village, Pitu Riase Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency. Data were collected using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The theoretical framework used is James E. Anderson's public policy theory, which includes five stages: problem formulation, policy formulation, policy adoption, implementation, and evaluation. The findings indicate that the Tana Toro Village Government has implemented several strategic programs aligned with SDGs indicators, such as rural road development to enhance economic accessibility for the poor, economic empowerment through skills training and microfinance assistance, and better-targeted social aid distribution. However, policy implementation still encounters various challenges, including limited human resources, constrained fiscal capacity, and suboptimal intersectoral coordination. This study recommends strengthening the institutional capacity of village governments through continuous technical training and assistance, improving data-based planning systems, and fostering synergy among stakeholders in policy formulation and implementation. Therefore, village policies can evolve beyond administrative functions and significantly contribute to inclusive and sustainable rural development.

**Keywords:** Village Government Policy, SDGs, Poverty Alleviation, Sustainable Development.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Desa Tana Toro dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dengan fokus utama pada upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kebijakan yang responsif dan inklusif menjadi kunci untuk memperkuat implementasi SDGs di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi. Teori kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori James E. Anderson, yang mencakup lima tahap: perumusan masalah, formulasi kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah melaksanakan sejumlah program strategis yang sejalan dengan indikator SDGs, seperti pengembangan infrastruktur jalan tani untuk mendukung aksesibilitas ekonomi warga miskin, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

98

Indexed



SINTA 5



modal, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas fiskal desa yang terbatas, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, penguatan sistem perencanaan berbasis data desa, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah Desa, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi suatu isu utama bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan ini menjadikan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar. Sebagai salah satu negara dengan komitmen kuat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun juga memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, penelitian ini bertujuan mengurai tantangan yang harus dihadapi, mengidentifikasi peluang percepatan pengentasan kemiskinan dan merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep dan produk keuangan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang efektif (Andarsari & Ningtyas, 2019). Tingkat literasi keuangan yang rendah pada UMKM sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Literasi keuangan yang memadai memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, mengakses pembiayaan, dan mengambil keputusan strategis (Gunawan et al., 2023).

Dengan melihat bahwa kemiskinan dari berbagai multidimensi atau yang biasa di istilahkan dengan *Multidimension Poverty Approach* (MPA). Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kesehatan yang buruk, minimnya pendidikan, standar hidup yang kurang memadai, minimnya pendapatan, kualitas kerja yang buruk, ketidakberdayaan serta rentan terjadinya kekerasan. Dengan ragam persoalan kemiskinan tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Tana Toro.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program dunia yang telah disahkan oleh PBB dan telah disepakati oleh 193 negara pada tahun 2015, salah satunya adalah Indonesia, untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam, baik di daratan maupun di lautan, secara berkelanjutan untuk menjaga kehidupan saat ini, masa depan, dan kesejahteraan masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui deklarasi ini sebagai paket tujuan pembangunan global yang mencakup: (1) Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Memastikan Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak dan Meningkatkan Kesehatan Ibu; (5) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (6) Membangun Kolaborasi Global untuk Pembangunan. Kebijakan Pemerintah berperan penting dalam pencapaian SDGs sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 111 tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Desa Tana Toro, baik dari aspek perencanaan, implementasi, maupun evaluasi, dalam rangka mendukung

pencapaian SDGs pada pengentasan kemiskinan. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa guna meningkatkan kapabilitas kebijakan dan akselerasi pembangunan berkelanjutan.

## METODE

Pada penelitian ini peneliti berangkat dari fenomena dan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang fenomena yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang terbuka dan fleksibel, jenis pengumpulan datanya juga sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, dan sifat objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang dimaksud yaitu penelitian kualitatif dimana penelitian yang menggambarkan data yang berupa tulisan serta mengamati perilaku orang yang diamati. Penelitian Kualitatif akan menggambarkan hasil penelitian dalam Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mencapai SDGs Khususnya Pada Pengentasan Kemiskinan di Desa Tana Toro Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan kenyataan suatu pokok masalah yang diselidiki serta diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat serta penelitian ini mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Deskriptif kualitatif ini mencoba menggambarkan bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mencapai SDGs di Desa Tana Toro Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan menggunakan metode tersebut karena metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diambil.

## PEMBAHASAN

### Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

#### 1. Tanpa Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tana Toro melalui kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), pembangunan jalan tani, dan penguatan BUMDes dapat dikaji secara mendalam menggunakan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Mubyarto (1998). Menurut Mubyarto, kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya modal, rendahnya produktivitas, minimnya keterampilan dan pengetahuan, serta keterbatasan akses terhadap kesempatan pembangunan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Tana Toro telah menyentuh sejumlah aspek dari penyebab kemiskinan struktural yang dijelaskan Mubyarto. BLT Dana Desa, misalnya, bertujuan menjangkau masyarakat miskin secara langsung dan menjadi intervensi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar. Program ini memperkuat daya beli masyarakat miskin yang secara ekonomi rentan, sesuai dengan poin bahwa kemiskinan sering kali diakibatkan oleh lemahnya daya tukar hasil produksi dan pendapatan rendah.

Lebih lanjut, pembangunan jalan tani yang difokuskan pada petani miskin menunjukkan perhatian desa terhadap faktor infrastruktur sebagai penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. Aksesibilitas yang lebih baik memungkinkan petani menjual hasil panen dengan lebih efisien, meningkatkan margin pendapatan dan mengurangi biaya distribusi — hal ini secara langsung mengatasi salah satu elemen dalam teori Mubyarto, yaitu rendahnya produktivitas dan keterbatasan mobilitas warga miskin.

Selain itu, penguatan BUMDes dan program simpan pinjam dengan bunga rendah merupakan kebijakan yang mendukung peningkatan modal dan kemandirian ekonomi. Walaupun belum optimal, arah kebijakan ini selaras dengan konsep Mubyarto bahwa kemiskinan dapat dikurangi melalui

pemberian akses modal usaha dan kesempatan berperan dalam pembangunan ekonomi desa.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama pada aspek pendidikan dan pendampingan sosial yang belum mendapat perhatian utama. Rendahnya intervensi desa dalam bidang ini menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan dan keterampilan belum sepenuhnya disentuh, padahal kedua aspek tersebut juga menjadi penyebab kemiskinan menurut Mubyarto. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah desa saat ini baru menjangkau dimensi ekonomi dan infrastruktur, namun belum sepenuhnya menyentuh dimensi sumber daya manusia.

Jika dilihat dari praktik pemerintahan, kebijakan ini menunjukkan arah yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan berbasis pada partisipasi masyarakat, meskipun perlu perbaikan dalam perencanaan jangka panjang. Secara umum, Desa Tana Toro telah menjalankan sebagian besar prinsip pengentasan kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto, meski masih terbatas pada aspek yang bersifat material dan infrastruktur.

## 2. Tanpa Kelaparan

Kondisi pemenuhan pangan di Desa Tana Toro menunjukkan bahwa ketahanan pangan belum menjadi prioritas dalam kebijakan desa. Hal ini dapat dikaji menggunakan teori Mubyarto, yang menempatkan rendahnya akses terhadap sumber daya dan produktivitas sebagai penyebab utama kemiskinan dan kelaparan. Kelaparan merupakan akibat langsung dari rendahnya pendapatan serta minimnya akses terhadap pangan bergizi, baik karena ketidaksediaan maupun ketidakmampuan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa mengandalkan bantuan pangan dari luar biasanya datang saat bencana dan belum merancang kebijakan lokal untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. Ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural yang memperkuat kerentanan warga terhadap kondisi darurat, sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kondisi ini menunjukkan lemahnya otonomi kebijakan lokal dalam sektor pangan. Ketiadaan lumbung desa, minimnya program penguatan kelompok tani pangan, serta belum adanya anggaran untuk intervensi gizi menandakan belum adanya integrasi antara kebutuhan warga dan perencanaan pembangunan desa.

Penelitian terbaru dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil mengurangi kelaparan umumnya mengandalkan pendekatan berbasis potensi lokal: lumbung pangan desa, kebun keluarga, diversifikasi tanaman pangan, dan pemberdayaan kelompok tani wanita. Model seperti ini belum terlihat secara konsisten di Tana Toro, sehingga pemerintah desa perlu mulai mengembangkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan mandiri.

## 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Pemerintah Desa Tana Toro telah menunjukkan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja melalui penguatan BUMDes, pembangunan infrastruktur pertanian, serta prioritas tenaga lokal dalam proyek desa. Langkah-langkah ini sesuai dengan teori James E. Anderson, yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan oleh pelaku kebijakan untuk menyelesaikan masalah.

Tindakan membentuk kelompok tani dan memperkuat kelembagaan ekonomi desa adalah bentuk intervensi aktif yang mencerminkan perencanaan kebijakan. Pemerintah desa tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mencoba membangun sistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pembangunan jalan tani, sebagaimana disebutkan oleh informan, memberikan akses yang lebih efisien bagi petani dalam membawa hasil panen, sehingga membuka peluang peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Dari kacamata ilmu pemerintahan, pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan fungsi eksekutif dalam pengambilan keputusan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah desa menjalankan peran sebagai fasilitator dan inovator ekonomi melalui pelibatan masyarakat.

Penelitian mutakhir dalam konteks SDGs menekankan pentingnya desa mengembangkan ekonomi produktif dan pekerjaan layak yang berbasis sumber daya lokal. Tana Toro telah mengarah ke sana,

meski perlu penguatan aspek kelembagaan dan inovasi usaha desa agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan berkelanjutan.

#### 4. Mengurangi Kesenjangan

Kebijakan pemerintah desa dalam mengurangi kesenjangan sosial terutama diwujudkan dalam bentuk perbaikan pendataan dan pemerataan pembangunan. Hal ini dapat dianalisis melalui teori Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pemerintah Desa Tana Toro memilih untuk bertindak dalam mengurangi ketimpangan melalui observasi langsung, verifikasi ulang data penerima bantuan, dan prioritas pembangunan infrastruktur ke dusun-dusun terpencil. Ini mencerminkan pilihan sadar dari pemerintah untuk mengintervensi ketimpangan, bukan sekadar membiarkannya.

Dalam praktik pemerintahan, ini menunjukkan bahwa desa menerapkan prinsip keadilan distributif memastikan bahwa pembangunan dan bantuan menjangkau seluruh warga tanpa diskriminasi. Selain itu, langkah seperti musyawarah dusun dan pelibatan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan diarahkan secara deliberatif, bukan sepihak.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di desa dapat ditekan jika kebijakan dilandasi data yang inklusif, melibatkan warga, dan menghindari dominasi elite lokal. Tana Toro telah menjalankan prinsip-prinsip ini, meski tantangan seperti keterbatasan SDM dan anggaran tetap perlu diatasi.

### Indikator Dalam Membuat Kebijakan

#### 1. Formulasi Masalah

Proses identifikasi masalah di Desa Tana Toro dilakukan secara partisipatif dan berbasis data lapangan. Ini menunjukkan penerapan prinsip James E. Anderson, di mana kebijakan bermula dari pengenalan masalah yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat serta ditindaklanjuti oleh pelaku kebijakan.

Data dikumpulkan dari laporan dusun, diverifikasi melalui survei lapangan, dan diproses dalam forum musyawarah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa memahami bahwa kebijakan harus bersumber dari kebutuhan masyarakat yang valid, bukan asumsi atau tekanan elite.

Dalam konteks ilmu pemerintahan, ini mencerminkan penerapan peran analisis kebijakan publik di tingkat lokal. Desa menjadi ruang deliberasi publik, di mana aktor-aktor lokal menyusun prioritas masalah untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan desa.

Penelitian terbaru mendukung pendekatan partisipatif dalam pengenalan masalah, karena menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan. Tana Toro telah menerapkan prinsip ini, meskipun masih perlu penguatan kapasitas perangkat desa dalam menganalisis data dan membuat pemetaan masalah yang lebih sistematis.

#### 2. Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan di Desa Tana Toro dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan setiap dusun. Ini merupakan implementasi langsung dari teori James E. Anderson, di mana kebijakan dirancang melalui serangkaian tindakan yang rasional, terarah, dan partisipatif.

Seluruh proses mulai dari penjaringan aspirasi, penyusunan rencana kegiatan tahunan, hingga validasi data menunjukkan bahwa formulasi kebijakan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga deliberatif. Pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan mengintegrasikan pandangan komunitas ke dalam kebijakan formal.

Dalam kerangka pemerintahan desa, pendekatan ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keterlibatan multi-aktor menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi demokratis secara substantif.

Studi kontemporer dalam kebijakan publik desa menyarankan pentingnya penguatan institusi perencanaan desa berbasis bukti. Tana Toro telah memulai ke arah ini, namun perlu didorong untuk memperluas penggunaan data dan evidence dalam menyusun program yang lebih terukur dan berorientasi hasil (outcome).

### 3. Penentuan Kebijakan

Penetapan kebijakan di Desa Tana Toro melalui musyawarah desa, pengesahan BPD, dan penerbitan Peraturan Desa (Perdes) merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut oleh Thomas R. Dye sebagai “kebijakan adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan”.

Proses ini menekankan bahwa setelah formulasi, perlu ada pilihan dan keputusan eksplisit yang memiliki kekuatan hukum dan anggaran. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, menjadi aktor sentral yang mengesahkan hasil musyawarah menjadi dokumen resmi dan bisa dieksekusi.

Dalam ilmu pemerintahan, ini mencerminkan pentingnya tahap pengambilan keputusan sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik. Keputusan harus mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, seperti yang diterapkan oleh Tana Toro.

Penelitian terbaru menyoroti pentingnya penguatan kapasitas legislasi desa dan akuntabilitas dalam proses penetapan kebijakan. Tana Toro telah menjalankan proses ini secara inklusif, dan tinggal memperkuat mekanisme dokumentasi serta evaluasi hasil keputusan.

### 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Tana Toro menunjukkan keterlibatan aktif tim pelaksana desa, kader, dan relawan. Ini sangat sesuai dengan teori James E. Anderson, bahwa kebijakan bukan hanya apa yang dirumuskan, tetapi juga bagaimana ia diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Kendala seperti data tidak valid, anggaran terbatas, dan ketidaktahuan warga menunjukkan bahwa implementasi adalah fase krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Pemerintah desa harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

Dari sudut pandang ilmu pemerintahan, implementasi adalah bentuk pelayanan publik yang konkret. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa sumber daya manusia, logistik, dan dukungan sosial tersedia agar kebijakan bisa dijalankan sebagaimana direncanakan.

Studi kebijakan desa menekankan pentingnya monitoring dan adaptasi cepat dalam implementasi. Praktik Tana Toro sudah menunjukkan arah tersebut, meskipun perlu peningkatan kapasitas teknis tim pelaksana dan sistem pelaporan yang lebih baik.

### 5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan apakah kebijakan akan dipertahankan, diubah, atau dihentikan. Dalam teori Thomas R. Dye, keputusan pemerintah untuk melanjutkan atau menghentikan suatu tindakan merupakan bagian dari definisi kebijakan itu sendiri.

Di Tana Toro, evaluasi dilakukan melalui rapat tahunan, koordinasi dengan pendamping program, dan pelaporan oleh tim pelaksana. Evaluasi ini bersifat terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak sekadar formalitas, tetapi digunakan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas pelaksanaan.

Dalam konteks pemerintahan desa, evaluasi menjadi indikator keberhasilan sistem kontrol internal dan bentuk akuntabilitas kepada warga. Evaluasi rutin membantu desa merespons kondisi aktual dan memperbaiki program di tahun berikutnya. Literatur terbaru dalam evaluasi kebijakan mendorong pendekatan berbasis hasil (outcome-based evaluation) dan pelibatan warga dalam penilaian. Ini merupakan tantangan selanjutnya bagi Tana Toro agar evaluasi tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi alat pembelajaran kebijakan yang adaptif dan inklusif.

## Strategi Dalam Mengatasi Kemiskinan

### 1. Pendidikan yang Layak

Pendidikan sebagai alat pemutus rantai kemiskinan sangat ditekankan oleh Mubyarto, yang

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

103

Indexed



SINTA 5



menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan dan keterampilan merupakan penyebab langsung kemiskinan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Tana Toro belum secara aktif menjadikan pendidikan sebagai prioritas kebijakan yang terstruktur.

Ketiadaan anggaran untuk beasiswa atau program pendampingan belajar menunjukkan bahwa desa belum berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal, berdasarkan teori Mubyarto, peningkatan pengetahuan dan keterampilan adalah prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan.

Dari sudut ilmu pemerintahan, ini menunjukkan perlunya penguatan peran desa sebagai aktor pembangunan sosial, bukan hanya ekonomi atau fisik. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merancang program berbasis kebutuhan lokal, termasuk pendidikan, dan ini dapat dimasukkan ke dalam APBDes.

Penelitian terbaru mendorong model pendidikan berbasis desa, termasuk beasiswa lokal, kelas belajar komunitas, dan literasi keluarga miskin. Tana Toro memiliki peluang untuk mengadopsi pendekatan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.

## 2. Penyuluhan dan Pendampingan Sosial

Penyuluhan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih produktif dan sehat. Teori James E. Anderson sangat relevan karena menekankan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah sosial.

Di Desa Tana Toro, penyuluhan masih tergantung pada pihak eksternal seperti puskesmas dan dinas sosial, dan belum menjadi program yang dirancang dan dijalankan secara mandiri oleh pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah desa belum mencapai tahapan formulasi dan pelaksanaan kebijakan yang sistematis dalam bidang sosial.

Dari aspek pemerintahan, pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator, tetapi belum menjadi pelaku utama dalam membentuk perilaku masyarakat melalui penyuluhan berkala. Rendahnya kapasitas SDM dan anggaran menjadi penghambat utama.

Studi terbaru dalam pembangunan lokal menegaskan pentingnya penguatan kapasitas internal desa, pelatihan kader, dan integrasi penyuluhan sosial ke dalam dokumen perencanaan desa (seperti RPJMDes dan RKPDes). Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya menjadi kegiatan tambahan, tetapi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

## 3. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan jalan tani, penguatan BUMDes, dan program simpan pinjam mencerminkan penerapan teori James E. Anderson, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, diambil dan dilaksanakan oleh pelaku kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pemerintah Desa Tana Toro secara aktif memilih strategi berbasis kebutuhan lokal, terutama karena sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural dalam aktivitas ekonomi, seperti akses jalan dan kekurangan modal usaha. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang disusun secara rasional untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga miskin.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, kebijakan pemberdayaan ekonomi seperti ini menunjukkan pergeseran peran pemerintah desa dari penyalur bantuan menjadi agen perubahan sosial-ekonomi. Pemerintah desa bertindak sebagai perancang intervensi, bukan hanya pelaksana program dari atas.

Studi mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi desa sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, kapasitas kelembagaan BUMDes, serta partisipasi aktif masyarakat. Tana Toro telah menapaki jalur ini, meski penguatan pelatihan, pemasaran, dan dukungan teknologi masih diperlukan.

## 4. Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Kebijakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan secara berlapis oleh Pemerintah Desa Tana Toro menunjukkan penerapan teori Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pemerintah desa memilih untuk secara aktif melakukan verifikasi data penerima bantuan melalui observasi dusun, musyawarah, serta input data ke sistem yang terhubung ke Dinas Sosial. Ini adalah keputusan yang sangat strategis, karena menyangkut keadilan dan efisiensi penggunaan dana bantuan. Sebaliknya, pemerintah juga memilih untuk tidak menyalurkan bantuan pada warga yang sudah mendapat bantuan dari program lain, untuk menghindari duplikasi.

Dari kacamata pemerintahan desa, hal ini mencerminkan praktik good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah dusun dan uji publik menjadi forum deliberatif untuk mencegah kecemburuan sosial dan memastikan penerima bantuan benar-benar layak.

Penelitian terbaru menyarankan integrasi antara data DTKS dan data desa berbasis musyawarah. Tana Toro telah mengarah ke sistem hybrid ini, sehingga menjadi contoh yang baik dalam penyaluran bantuan sosial berbasis kebutuhan riil.

## 5. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan jalan tani dan saluran irigasi merupakan bentuk kebijakan pembangunan fisik yang dilakukan secara sadar dan terarah, sesuai dengan teori James E. Anderson. Dalam perspektif ini, kebijakan adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pelaku pemerintahan guna menyelesaikan persoalan nyata, yakni hambatan ekonomi akibat infrastruktur yang buruk.

Pemerintah Desa Tana Toro merancang pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan lokal masyarakat, khususnya petani. Langkah ini menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Dalam praktik pemerintahan desa, ini mencerminkan pelaksanaan fungsi penyediaan pelayanan publik (public services) melalui pendekatan bottom-up. Pemerintah desa mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Literatur pembangunan desa terkini menegaskan bahwa pembangunan fisik seperti jalan tani dan irigasi adalah investasi produktif yang mendukung pencapaian SDGs, asalkan dilakukan dengan partisipasi warga dan perawatan berkelanjutan. Model yang digunakan Tana Toro melalui musyawarah dusun dan gotong royong telah mencerminkan praktik ideal ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai "Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Mencapai SDGs Khususnya pada Pengentasan Kemiskinan di Desa Tana Toro", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Desa Tana Toro telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang selaras dengan indikator SDGs dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dalam program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan jalan tani, penguatan BUMDes, serta verifikasi data penerima bantuan sosial. Meskipun belum seluruh indikator SDGs dilaksanakan secara optimal, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta penyusunan data yang lebih akurat dan inklusif. Namun, beberapa indikator seperti pendidikan, ketahanan pangan, dan penyuluhan sosial masih perlu diperkuat agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh.

### 2. Indikator Dalam Membuat Kebijakan

Pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Desa Tana Toro telah mengikuti tahapan-tahapan kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, penetapan, implementasi, hingga evaluasi. Tahapan tersebut dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan forum warga, dengan

melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desa dibentuk dari bawah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga telah mengintegrasikan data dan informasi faktual dari lapangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Namun, proses evaluasi dan tindak lanjut masih perlu ditingkatkan, agar kebijakan yang sudah ditetapkan dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.

### 3. Strategi Mengatasi Permasalahan Kemiskinan

Strategi Pemerintah Desa Tana Toro dalam mengatasi kemiskinan dilakukan melalui kombinasi kebijakan bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar. Penyaluran BLT secara tepat sasaran dilakukan melalui sistem pendataan dan verifikasi berlapis. Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan BUMDes, pembentukan kelompok tani, serta pemberian akses terhadap program simpan pinjam dengan bunga rendah. Pembangunan jalan tani dan irigasi juga mendukung peningkatan produktivitas warga. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mengandalkan bantuan konsumtif, tetapi juga mulai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, strategi ini masih menghadapi tantangan dalam hal pendampingan, penyuluhan, serta perluasan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat miskin.

## REFERENSI

- Ade Irma Triani, Muhammad Subhan, & Ahmad Syukron Prasaja. (2023). Analisis strategi pencapaian sustainable development goals (sdgs) pada industri kecil menengah cik mia songket. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4), 142–156. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.236>
- Al-fa'izah, Z., Rahayu, Y., & Hikmah, N. (2017). Digital repository universitas jember digital repository universitas jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2021). Sustainable transport, sustainable development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Aryani, & Nurhazana. (2024). Analisis strategi pemerintah desa dalam pencapaian sustainable development goals (sdgs) desa di kecamatan rupa. 5(2). 1\* aryani1302@gmail.com, 2nurhazana@polbeng.ac.id%0aabstrak
- Asmara, Q. (2009). Evaluasi implementasi kebijakan penyediaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai energi alternatif. *Jurnal Kebijakan*, 10–46.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Peran badan pemeriksa keuangan RI dalam sdgs. *Badan Pemeriksa Keuangan RI*. [https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach\\_page\\_1652255145.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf)
- Dunggio, T. (2020). Analisis implementasi kebijakan program bantuan benih jagung hibrida di kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (Jeba)*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.47918/v1i1.7>
- Hamas, F. A., & Salahudin. (2021). Kebijakan perencanaan pembangunan: sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review). *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 75–89. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1138>
- Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi dan implementasi kebijakan program sustainable development goals (sdgs) untuk pengentasan kemiskinan di desa. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65–78. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.32690>
- Joni Suwarno. (2012). Kualitas pelayanan pemerintahan desa (studi pelayanan ktp dan kk di desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu kabupaten tanah bumbu). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2), 184–213. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jippl/article/view/810>
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar*.
- Noery, P. H. F., Syam, H. M., & Sartika, M. (2022). “kebijakan informasi badan pengembangan sumber

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- daya manusia (bpsdm) aceh dalam menyebarkan informasi kepada publik.” *Ilmiah mahasiswa fisip usk*, 22(1), 14–31. <https://doi.org/10.37278/insearch.v22i1.621>
- Pitono, a., & kartiwi, k. (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal politikologi*, 3(1), 27–37.
- Rahmi, a. (2019). Analisis kebijakan peraturan bupati solok tentang penyelenggaraan pendidikan sekolah umum berbasis pesantren pada satuan pendidikan dasar di kabupaten solok. *Produ: prokurasi edukasi jurnal manajemen pendidikan islam*, 1(1), 10–17. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3323>
- Ramadhanti, t. A. (2024). *Skripsi implementasi sustainable development principle terhadap permasalahan lingkungan halaman judul implementasi sustainable development principle*.
- Rivanlee, a., & laksmono, b. S. (2020). Kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. *Jurnal borneo administrator*, 5(1), 1–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/297928466.pdf>
- Saputri, m. A., millah, m. N., falah, r. N., & dewi, s. A. (2025). *Strategi pengentasan kemiskinan : tantangan dan peluang dalam mewujudkan sdgs di indonesia*.
- Siti khoiriah, s.h.i., m. H., & dr. Candra perbawati, s.h., m. . (2022). Peran desa menuju sustainable development goals (studi pada desa-desa di kabupaten lampung timur). In *braz dent j*. (vol. 33, issue 1).
- Studi, p., lembaga, a., syariah, k., ekonomi, f., & bisnis, d. A. N. (2023). *Pengelolaan pajak daerah terhadap sustainability development goals di kabupaten soppeng*.
- Sunarti, n. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. In *ilmiah ilmu pemerintahan* (vol. 2, issue 2, pp. 786–796). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696>
- Supandi. (2022). *Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqhi siyasah (studi kasus desa lauwo) skripsi*.
- Wilar, m. M., pati, a. B., & pangemnanan, s. E. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di desa kecaatan maesa kabupaten minahasa selatan. *Jurnal governance*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213>

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

107

